

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup lebih baik yang dimaksud yaitu berupa peningkatan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Peningkatan ini bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga dapat didukung oleh keberhasilan pemerintah beserta masyarakat dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang turut dalam menggerakkan aktifitas produksi yang dapat meningkatkan perekonomian. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan ketersediaan barang penunjang kebutuhan hidup, perluasan distribusi, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial (Todaro & Smith, 2006).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi. Adanya faktor tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah:29)

Adapun tafsir Ibnu Katsir mengenai Surah Al-Baqarah ayat 29 yaitu bumi telah diciptakan terlebih dahulu sebelum langit diciptakan sebagaimana dijelaskan pada Fushshilat ayat 9-12. Imam Ibnu Katsir juga mengutip jawaban dari sahabat yaitu Ibnu Abbas dalam Shahih Bukhari yang mengatakan, “Bumi diciptakan sebelum adanya langit. Tetapi memang bumi ‘dibentangkan’ setelah langit diciptakan.” Adapun menurut Ibnu Katsir kata ‘dahaha’ atau pembentangan dalam Surat An-Naziat bermakna pengeluaran potensi dan sumberdaya alam yang ada di bumi seperti air sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam jenis, sifat dan bentukan dari pepohonan.

Allah SWT juga telah memberikan perintah kepada umat manusia untuk bekerja dan memakmurkan dunia sebagaimana pada firman-Nya yaitu:

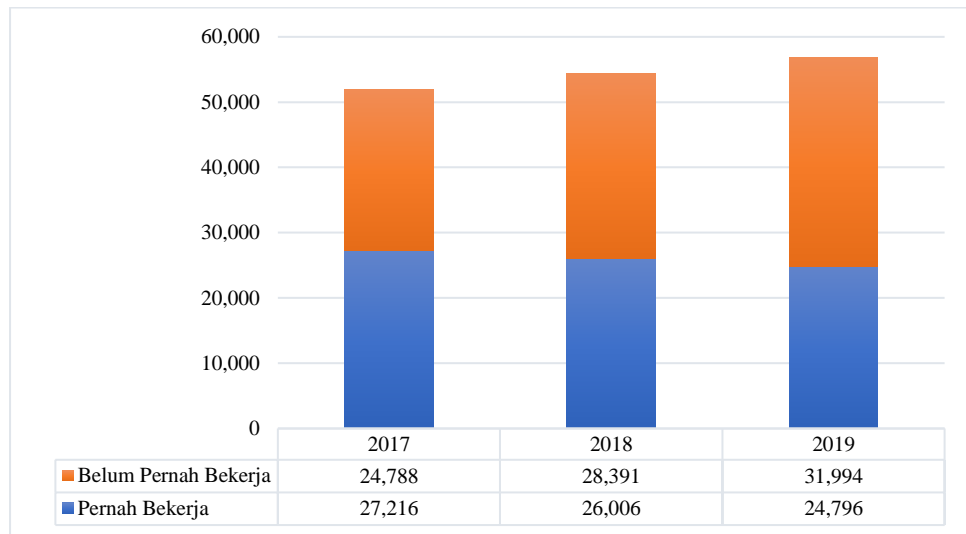
“Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja).” (Q.S An-Naba:11). “Kami telah menjadikan untukmu semua didalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja); tetapi sedikit sekali diantaramu yang bersyukur.” (Q.S A’raf:10). Di dalam Hadits Riwayat Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi juga disebutkan bahwa “Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanaka ibadah fardhu.”

Dalam prakteknya pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kegiatan industri sebagai kegiatan utama dalam perekonomian. Kegiatan industri sendiri yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Pembangunan ekonomi berbasis industri juga berusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan seiring pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat. Pembangunan

ini tidak hanya bertujuan mencapai fisik saja tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Arsyad, 2004).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat melakukan pembangunan ekonomi. Sama halnya dengan negara lain, pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan menyejahterakan taraf hidup masyarakat. Sebagai negara dengan bentuk kepulauan tentulah pembangunan harus merata. Pembangunan tidak hanya dilakukan di ibukota seperti Jakarta atau pulau Jawa melainkan juga harus menjangkau daerah yang lebih kecil seperti provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan desa. Menurut Wijaya dkk (2014) pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah yang lebih kecil akan memberikan hasil yang dapat menunjang pembangunan di wilayah yang lebih besar.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi yaitu masalah ketenagakerjaan berupa penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. Ketidakmampuan sektor lapangan kerja dalam menampung angkatan kerja (penduduk yang siap bekerja) menyebabkan terjadinya pengangguran. Seperti kondisi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana jumlah tenaga kerja berlebih tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. Penambahan jumlah pengangguran dapat menjadi beban perekonomian dan mengurangi tingkat kesejahteraan (Sasana, 2009).



Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.1

Jumlah Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah

tahun 2017-2019

Berdasarkan gambar 1.1 diatas jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran yaitu 52.004 orang dengan 27.216 orang pernah bekerja dan 24.788 belum pernah bekerja. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran meningkat yaitu 54.397 orang dengan 26.006 orang pernah bekerja dan 28.391 belum pernah bekerja. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2019 sebesar 56.790 orang dengan 24.796 orang pernah bekerja dan 31.994 belum pernah bekerja. Peningkatan angka pengangguran selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran merupakan masalah serius yang harus segera dicari penyelesaiannya.

Faktor tenaga kerja sebagai salah satu komponen keberhasilan pembangunan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Pemanfaatan yang sesuai dalam sektor usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan ekonomi baik di skala daerah ataupun skala nasional. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat akan menambah angkatan kerja setiap tahunnya. Penambahan angkatan kerja ini dapat dijadikan pemacu dalam pembangunan ekonomi apabila dimaksimalkan sebaik mungkin. Namun kurangnya jumlah lapangan pekerjaan membuat angkatan kerja ini menjadi tidak produktif dan pembangunan ekonomi terhambat.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang bercorak agraris. Sektor pertanian merupakan sektor utama karena hampir sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor ini. Selain pertanian, Kalimantan Tengah juga memiliki beberapa sektor lain sebagai penunjang nilai PDRB di wilayahnya. Sektor lapangan usaha di Kalimantan Tengah dibagi menjadi 17 sektor. Semakin besar kontribusi yang diberikan masing-masing sektor maka semakin besar pula nilai PDRB.

TABEL 1.1
Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2019

No	Lapangan usaha	Distribusi (%)		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, perikanan, kehutanan	20,91	19,85	18,80
2	Pertambangan dan penggalian	11,44	11,63	11,925
3	Industri pengolahan	16,8	17,14	17,48
4	Pengadaan listrik dan gas	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,8	10,17	10,45
7	Perdagangan besar dan eceran	12,02	12,17	12,32
8	Transportasi dan pergudangan	6,85	6,96	7,07
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	1,86	1,87	1,86
10	Infomasi dan komunikasi	0,97	0,94	0,92
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,3	3,31	3,34
12	Real estat	2,13	2,14	2,14
13	Jasa perusahaan	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,19	6,08	5,99
15	Jasa pendidikan	4,58	4,56	4,50
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,9	1,93	1,95
17	Jasa lainnya	1,04	1,05	1,05

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 di atas sektor industri pengolahan menduduki peringkat kedua terbesar penyumbang PDRB setelah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Persentase dari sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 16,8% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 17,14%. Kontribusi terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 17,48%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berperan penting terhadap nilai PDRB Kalimantan Tengah. Berbeda dengan sektor pertanian, perikanan dan

kehutanan yang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menyumbang 20,91% terhadap PDRB. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing nilai sebesar 19,85% dan 18,8%.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri pengolahan dapat dibagi menjadi 4, yaitu industri besar (≥ 100 tenaga kerja), industri menengah (20-99 tenaga kerja), industri kecil (5-19 tenaga kerja) dan industri mikro (1-4 tenaga kerja). Dalam kenyataan di lapangan industri kecil dan industri menengah sering digabung menjadi industri kecil dan menengah. Industri ini dinilai mampu mengatasi masalah pengangguran yang menjadi masalah utama dalam penyerapan tenaga kerja. Dibandingkan dengan industri besar yang bersifat teknologi padat modal, industri kecil dan menengah lebih memaksimalkan dalam hal penggunaan sumberdaya manusia (teknologi padat karya). Hal ini dikarenakan industri kecil dan menengah lebih fleksibel, dinamis dan mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Dalam hal perekrutan biasanya calon pekerja tidak diberatkan dengan kualifikasi tertentu dan berasal dari warga sekitar tempat industri berada.

Sektor industri kecil dan menengah bergantung pada jumlah unit usaha dan investasi. Semakin bertambahnya jumlah unit usaha maka akan terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi angka pengangguran. Investasi dapat digunakan oleh pengusaha untuk menambah jumlah unit usaha, meningkatkan output dan menambah tenaga kerja.

Jumlah unit usaha dan investasi di sektor industri kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Kombinasi kedua faktor ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah.

TABEL 1.2

Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2019

Tahun	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Investasi
2017	21.269	7.688	266.541.430.000
2018	27.646	7.953	370.040.443.000
2019	29.362	8.626	390.001.845.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 diatas bahwa jumlah unit usaha dan nilai investasi mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah unit usaha sebanyak 7.688 unit dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 7.953 unit. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8.626 unit. Investasi juga mengalami peningkatan seperti halnya jumlah unit usaha. Pada tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp 266.541.430.000 dan meningkat menjadi Rp 370.040.443.000 pada tahun 2018. Peningkatan investasi terus berlanjut pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 390.001.845.000. Peningkatan jumlah unit usaha dan nilai investasi ini juga diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja selama tahun 2017-2019.

Usaha pemerintah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja tidak hanya dari sisi industri kecil dan menengah. Pemerintah juga mengatur mengenai upah tenaga kerja. Upah diatur dalam undang-undang

dengan penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum bertujuan agar pengusaha tidak semena-mena dalam memberikan upah dan menjamin kesejahteraan pekerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat dijabarkan lagi menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Upah minimum sektoral provinsi yaitu upah yang diberikan kepada masing-masing sektor yang mempunyai nilai berbeda dari suatu provinsi.

TABEL 1.3

Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Nama Sektoral	UMSP
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	2.294.126
2	Industri Pengolahan	2.294.126
3	Konstruksi/Bangunan	2.316.399
4	Pertambangan/Penggalian	2.338.672
5	Jasa	2.294.126
6	Listrik, Gas dan Air	2.316.399

Sumber: Pergub Kalimantan Tengah

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dilihat Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah tahun 2017. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.227.307/bulan. Sektor dengan upah tertinggi yaitu sektor pertambangan/penggalian sebesar Rp 2.338.672. Sektor dengan upah terendah yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, industri pengolahan dan jasa sebesar Rp 2.294.126. Industri kecil dan menengah termasuk kedalam sektor industri pengolahan sehingga upah yang diterima pekerja di sektor ini yaitu sebesar Rp 2.294.126.

Ada dua hasil yang menyatakan pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu berpengaruh positif dan berpengaruh negatif. Mayoritas

penelitian menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun perusahaan juga dapat melakukan penarikan tenaga kerja untuk memaksimalkan laba. Penarikan tenaga kerja terus dilakukan sampai pada titik dimana produk marginal tenaga kerja sama dengan upah riil. Hal ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan tambahan dari kenaikan produksi yang dihasilkan oleh tambahan tenaga kerja (Mankiw, 2003).

Banyaknya jumlah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah akan berdampak pada nilai PDRB. Masalah ketenagakerjaan yang tidak segera diatasi akan membuat nilai PDRB semakin kecil dan pembangunan ekonomi terhambat. Jumlah unit usaha yang semakin bertambah, nilai investasi yang meningkat dan penetapan upah minimum kabupaten/kota diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah. Apabila semua faktor ini dapat saling mendukung satu sama lain maka akan terciptanya pembangunan ekonomi dengan capaian taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019?
2. Apakah nilai investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019?
3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019?
4. Apakah jumlah unit usaha, nilai investasi dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, nilai investasi dan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis berkesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan. Selain itu penulis juga dapat memahami mengenai penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan memberikan informasi terkait penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dinas terkait dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan terkait penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga kedepan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan lebih optimal.

4. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Tengah.